BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbanyak dengan jumnlah penduduk terpadat ke empat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat, yaitu sebanyak 278.752.361 jiwa atau sebesar 3,51% dari total penduduk dunia. Tingginya jumlah penduduk, percepatan pertambahan penduduk, dan tidak meratanya persebaran penduduk merupakan permasalahan kependudukan Indonesia. Masalah kependudukan ini bersifat jangka panjang karena setiap harinya jumlah penduduk akan terus bertambah.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjukkan berapa banyak penduduk pada waktu tertentu di suatu wilayah. Selanjutnya, jika pertumbuhan penduduk terus meningkat tetapi tidak dibarengi dengan munculnya pasar tenaga kerja, kemungkinan besar sebagian besar penduduk akan menganggur. Pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berdampak 1endidik bagi berbagai bidang ekonomi, sosial ataupun politik. Masalah ini cukup serius apabila tidak segera dicari solusinya. Hal inilah mendorong pemerintah dalam mencari upaya untuk mengatasi masalah kependudukan melalui Program Keluarga Berencana

Pada periode tahun 2020 hingga 2030 mendatang, Indonesia diperkirakan akan menghadapi bonus demografi, yaitu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif dengan

jumlah penduduk 191,08 juta (70,72%). Angka ini jauh mengalahkan penduduk muda (0-14 tahun) sebesar 63,03 juta (23,33%) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebesar 16,07 juta (5,95%). Pembangunan karakter bangsa diperlukan untuk menghadapi bonus Demografi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembenahan yang serius dalam menghadapi tantangan kedepan. (BPS 2020)

Indonesia memiliki suatu lembaga pemerintahan yang berfokus pada program di bidang kependudukan dan keluarga. BKKBN atau Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional merupakan lembaga nonkementrian yang bertugas di pemerintahan pada bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meminimalisis pertumbuhan penduduk. Terbentuk pada tahun 1970 KB (Keluarga Berencana) bertujuan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dengan bantuan Program KB (Keluarga Berencana), pemerintah Indonesia telah membuat strategi khusus dalam mengatasi masalah pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan berhasilnya pelaksanaan keluarga berencana diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih meningkat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, KB mencakup upaya pengendalian persalinan,

jarak dan umur persalinan yang ideal, mengatur kehamilan, dan memastikan perempuan memiliki akses terhadap perlindungan, bantuan, dan hak reproduksi dalam rangka membangun keluarga yang kokoh. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan KB yaitu usia, agama, pendidikan, pekerjaan, budaya, aksesibilitas pelayanan KB dan kualitas pelayanan penerima KB (BKKBN, 2014).

Program KB merupakan rencana pembangunan nasional yang sangat penting sebagai upaya membentuk keluarga Indonesia yang sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Program KB merupakan upaya penyadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam menjadikan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (UU 10/1992).

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang BKKBN mempromosikan kebijakan tentang Program Bangga Kencana kepada masyarakat umum. Program Bangga Kencana dicanangkan pada 2016 kemudian dikemas dan diperkenalkan pada tahun 2019 yang semula memiliki nama yaitu Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Perubahan nama dilakukan karena pengucapan sebelumnya yang sulit diucapkan oleh masyarakat dengan peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang bertujuan dalam merencanakan kehidupan semenjak kehamilan, balita, remaja, serta memasuki pernikahan dan merencanakan kelahiran.

Program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan, Keluarga Berencana) merupakan Program BKKBN yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mendorong keluarga dalam merencanakan keluarga, memiliki anak, mengatur jarak kelahiran, 4endidikan, sehingga tercipta keluarga yang berkualitas (BKKBN 2020).

Dalam pelaksanaannya Program Bangga Kencana memiliki beberapa kegiatan yakni meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) yang merupakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan khusus dalam kegiatan pada Program Bangga Kencana yaitu untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan orangtua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita maupun remaja. Untuk balita berhubungan dengan pola asuh balita, perkembangan fisik atau tumbuh kembang balita, kemampuan motorik. Sedangkan untuk remaja mengenai cara efektif berinteraksi dengan remaja, bimbingan kepada anak remaja, dan lain-lain. Kemudian, ada kesejahteraan lansia agar tetap memiliki produktifitas yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) seringkali dianggap kurang penting dan belum diprioritaskan. Namun dengan adanya Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga* menjadikan program Keluarga Berencana ditopang dengan dua program lainnya, yaitu Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (BKKBN, 2020).

Program Bangga Kencana dan pembangunan berupaya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Sejalan dengan semangat pembangunan tersebut maka PKB menggiatkan Program Bangga Kencana di tengah-tengah masyarakat. Melihat besarnya cakupan wilayah dan cakupan Program Bangga Kencana, maka keseluruhan pihak terkait perlu bergerak harmonis agar program ini dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, untuk menyatukan gerak berbagai pihak dalam pembangunan Program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan, maka diperlukan suatu mekanisme operasional yang jelas serta mudah dipahami dan diterapkan oleh tenaga pelaksana program.

Program KB masih akan mengalami hambatan–hambatan dalam pelaksanaannya hingga saat ini yaitu banyaknya pasangan usia subur memilih untuk tidak ikut Program KB. Penyebabnya dilihat dari beberapa aspek, yaitu sosialisasi dan pemahaman KB yang belum optimal, pelayanan dan jumlah anak (Choiriah, 2011). Sarana utama 5endidikan adalah menyukseskan tujuan pelaksanaan keluarga berencana. Kondisi ekonomi dan pendapatan berperan pada meningkatkan pemahaman dalam menggunakan alat kontrasepsi. Data demografi Indonesia membuktikan bahwa 60% populasi Indonesia hanya tamat SD, atau bahkan lebih rendah lagi yaitu tidak bersekolah. Dan hanya 6% yang berpendidikan tinggi hingga ke perguruan tinggi (BPS 2020)

Selama 10 (sepuluh) tahun (2002-2012) Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan hidup oleh seorang perempuan stagnan di angka 2,6 (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI, tahun 2002 dan 2012). Oleh karena itu Program KB mulai kembali digaungkan,

dan mulai menunjukkan hasil positif dengan turunnya TFR menjadi 2,4 (SDKI 2017). Walau demikian, hasil ini masih jauh dari target ideal TFR yaitu sebesar 2,1. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan program ini sangat penting. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga yang sangat terkait, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), untuk bekerja lebih keras untuk mengajak, memperkenalkan Program Bangga Kencana kepada masyarakat umum.

Program Bangga Kencana juga dimaksudkan dalam menekan jumlah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 20 tahun. Karena, umur ideal pernikahan adalah minimal 25 tahun bagi laki-laki dan minimal 21 tahun bagi perempuan (BKKBN 2022). Program Bangga Kencana dilaksanakan tidak hanya meminta para akseptor untuk memakai alat kontrasepsi, tetapi juga berusaha meningkatkan pendapatan dengan bekerja sama dengan perangkat daerah.

Stunting merupakan salah satu kondisi yang terjadi akibat kekurangan gizi yang dialami oleh balita yang mengakibatkan anak terlalu pendek dari usianya. Hal ini dapat terjadi semenjak bayi masih berada dalam kandungan dan setelah bayi lahir yang dapat terlihat setelah berusia 2 tahun (BPS,2019). Program Bangga Kencana ini diharapkan akan mampu menyampaikan edukasi yang berguna untuk masyarakat khususnya bagi generasi muda seperti dengan adanya sosialisasi terkait agar mampu memahami hal- hal yang terkait tentang menunda pernikahan dini dan berfokus kepada 6endidikan dan pekerjaan agar mampu terlepas dari kemiskinan.

Program Bangga Kencana 2024 diharapkan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Menurut dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG selaku kepala BKKBN jika kualitas SDM Indonesia meningkat, maka akan lebih kompetitif dan kemiskinan akan berkurang. Untuk mencapai tujuan ini, BKKBN berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan keluarga melalui Program Bangga Kencana. Keluarga berkualitas di sini adalah yang memiliki tujuan untuk berkeluarga, memiliki anak, berpendidikan tinggi, dan hal-hal lain.

Salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang populasinya meningkat dengan cepat adalah Sumatera Utara. Penduduk Sumatera Utara berjumlah 13.766.851 pada tahun 2015, naik menjadi 14.562.549 pada tahun 2019 (BPS Sumut, 2020). Ini menunjukkan bahwa antara tahun 2015 dan 2019 terjadi peningkatan penduduk sebesar 795.698 jiwa, atau rata-rata 159.139 jiwa per tahun, tersebar di berbagai wilayah Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 320.542 jiwa ditahun 2021 dengan kepadatan penduduk 85 jiwa/km2. Banyaknya rumahtangga pada 2018 sebesar 69.302 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4 orang. Dengan jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya mengurangi pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan menjalankan program KB melalui Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya mengurangi pertumbuhan penduduk yang

tinggi dengan menjalankan program KB melalui Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2020	312.758
2	2021	315.222
3	2022	318.424

Sumber BPS 2022

Berdasarkan pada tabel 1 jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara diketahui dalam kurun waktu tiga tahun Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara cenderung meningkat. Salah satu penyebab hal ini adalah karena meningkatnya nilai penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung penduduk yang tidak produktif (usia < 15 tahun dan usia >65 tahun). Penyebab lainnya adalah masih related tinggi jumlah kelahiran setidaknya dalam satu 8endid terakhir. Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur, penduduk berusia muda (0-14 tahun) sebesar 29,56 %, berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 65,56 % dan berusia tua (>65 tahun) sebesar 7,87 % (BPS 2022)

Tabel 2 Jumlah Peserta KB Kabupaten Tapanuli Utara 2020 -2022

No	Tahun	Jumlah Peserta KB
1	2020	22.843
2	2021	24.996
3	2022	13.954

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2023

Berdasarkan tabel 2 maka dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB (Keluarga Berencana) di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2020 sebanyak

22.823 jiwa dan sebanyak 24.996 jiwa pada tahun 2021 yang berarti mengalami peningkatan. Tetapi jumlah peserta KB (Keluarga Berencana) pada tahun 2022 mengelami penurunan menjadi 13.674 jiwa. Menurunnya jumlah peserta KB (Keluarga Berencana) disebabkan karena pemahaman masyarakat masih rendah atas manfaat dan pentingnya program ini serta masih terbatasnya akses penyaluran kebutuhan pendukung alat KB ke desa. Peserta KB di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan peserta Program Bangga Kencana juga sehingga jumlah peserta pada program adalah sama.

Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas 15 kecamatan yang melaksanakan Program Bangga Kencana yaitu Tarutung, Siatas Barita, Adiankoting, Pahae Julu, Pahae Jae, Simangumban, Sipoholon, Purba Tua, Siborongborong, Pagaran, Parmonangan, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga, dan Muara. Program Bangga Kencana terlaksanakan di 15 kecamatan yang dilaksanakan di desa setiap kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara. Setiap kecamatan di Kabupatan Tapanuli Utara memiliki sekitar 300 peserta pada pelaksanaan Program Bangga Kencana ini. Kecamatan Siatas Barita merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang menjalankan Program Bangga Kencana. Kecamatan Siatas Barita memiliki 12 desa yaitu Desa Simorangkir Julu, Simorangkir Habinsaran, Enda Portibi, Lumban Siagian Julu, Lumban Siagian Jae, Sangkaran, Sitompul, Pancurnapitu, Siraja Hutagalung, Lobu Hole, Simanampang dan Sidagal dengan jumlah penduduk sebanyak 14.386 jiwa (BPS 2022).

Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Tapanuli Utara diketahui sebanyak 32.916 jiwa dengan jumlah akseptor KB aktif sebanyak 13.954. Sedangkan jumlah PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) di Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 26 orang dan ditempatkan di 15 Kecamatan. Dengan data tersebut maka 1 (satu) orang PKB akan melayani kurang lebih 1.285 PUS. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah petugas dan peserta tidak sebanding jumlahnya. Hal ini dapat berdampak pada pengelolaan dan pelaksanaan program yang dapat menurunkan atau menghambat pencapaian tujuan pelaksanaan program.

Pemerintah memiliki program dalam upaya menangani masalah yang terjadi di masyarakat. Namun, ada program yang gagal dan kurang diperhatikan keberhasiannya dalam masyarakat. Sebuah program dikatakan berhasil jika diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, berkualitas, dan memberikan kepuasan pelanggan. Program harus berhasil agar mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

Suatu program dikatakan berhasil apabila program berjalan sesuai rancangan dan menyentuh objek kebijakan secara langsung. BKKBN merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berperan dalam kegiatan yang menyelaraskan Program Bangga Kencana. Untuk memahami secara menyeluruh dan mendalam terkait pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara serta mengetahui hambatan–hambatan yang mungkin terjadi pada program tersebut, maka penulis akan membahasnya dalam

bentuk skripsi penelitian yang diberi judul: “Analisis Pelaksanaan Program Bangga Kencana Di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Angka kelahiran (TFR) yang tinggi di Kabupaten Tapanuli Utara, angka kehamilan/kelahiran yang tidak diinginkan serta resiko bayi lahir dan ibu melahirkan yang cukup tinggi
2. Program Bangga Kencana seperti Program Bina Keluarga Balita (BKB), Program Bina Keluarga Remaja (BKR), Program Bina Keluarga Lansia (BKL),) Program Pemberdayaan Masyarakat (Dapur Sehat Atasi Stunting) masih belum optimal
3. Pelaksanaan Program Bangga Kencana masih mengalami banyak hambatan – hambatan
4. Metode komunikasi yang kurang update dalam upaya sosialisasi program karena kelompok sasaran program Bangga Kencana adalah keluarga muda yang memiliki karakter digital

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti di kecamatan Siatas Barita yaitu pelaksanaan Program

Bangga Kencana, hambatan dan tingkat keberhasilan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siatas Barita.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siatas Barita ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siatas Barita ?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siatas Barita ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas maka, tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siatas Barita
2. Hambatan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siatas Barita
3. Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siatas Barita

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan memperdalam kajian – kajian teori dan wawasan terkhusus tentang pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan pembelajaran serta kajian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya, sebagai saran dan masukan pada pemerintah dan instansi terkait, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) untuk kesejahteraan keluarga.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY